

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN KeadILAN ATAS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
TERKAIT SENGKETA TRANSAKSI TRANSFER PRICING**

SKRIPSI

Oleh

MOKHAMAD KHIFNI

2240057028



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN KeadILAN ATAS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
TERKAIT SENGKETA TRANSAKSI TRANSFER PRICING**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

MOKHAMAD KHIFNI

2240057028



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

VISI

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila."

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga -lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan:

Nama : Mokhamad Khifni
NIM : 2240057028
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis akhir yang berjudul “ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan Atas Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Terkait Sengketa Transaksi *TRANSFER PRICING*” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari Kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tulis akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,




Mokhamad Khifni
NIM.2230057028



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

“Analisis Kepastian Hukum Dan Keadilan Atas Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Terkait Sengketa Transaksi Transfer Pricing”

Nama : Mokhamad Khifni
NIM : 2240057028
Program Studi : Hukum
Peminatan : Praktisi Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 3 Juli 2025

Menyetujui:

Pembimbing I

(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NIDN: 0302117904

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0327046303

Pembimbing II

(Dr. Tomson Situmeang, SH., MH.)
NIDN: 0325028101



Dekan

(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NIDN: 0302117904



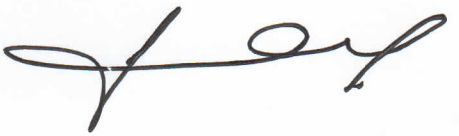
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal, 3 Juli 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Mokhamad Khifni
NIM : 2240057028
Program Studi : Hukum
Peminatan : Praktisi Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Kepastian Hukum Dan Keadilan Atas Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Terkait Sengketa Transaksi Transfer Pricing” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Ketua	
2. Dr. Tomson Situmeang, SH., MH	Anggota	
3. Haposana Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mokhamad Khifni
NIM : 2240057028
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Kepastian Hukum Dan Keadilan Atas Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan Terkait Sengketa
Transaksi *Transfer Pricing*.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non-Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta
Pada Tanggal, 3 Juli 2025



Mokhamad Khifni
2240057028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“Analisis Kepastian Hukum Dan Keadilan Atas Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Terkait Sengketa Transaksi Transfer Pricing.”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata-1 (S1) dibidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI).

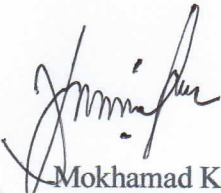
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia
3. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing pertama yang selalu membimbing, memberikan masukan akademis yang membangun.
4. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, sekaligus dosen pembimbing kedua dari penulis.
5. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang selalu membimbing, memberikan masukan serta saran.
6. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan Penulis banyak masukan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen program studi Fakultas Hukum dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan akademik dan keilmuan, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum. Kiranya segala usaha dan kerja keras ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, 3 Juli 2025



Mokhamad Khifni
2240057028



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	v
VISI DAN MISI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	iiii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Rancangan Sistematika Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Teori Kepastian Hukum	23
C. Konsep Hukum Pajak.....	31
D. Pengadilan Pajak	32
E. Sengketa Pajak.....	34
F. Banding	37
G. Putusan Pengadilan	38
H. Hubungan Istimewa.....	41
I. Transfer Pricing (Harga Transfer).....	43
J. Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha (PKKU).....	44
BAB III PENERAPAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERPAJAKAN TERKAIT TRANSAKSI TRANSFER PRICING DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN BAGI WAJIB PAJAK PENCARI Keadilan.....	50

A. Penerapan Peraturan Perpajakan dan Permasalahan Terkait Transaksi Transfer Pricing Di Indonesia	50
B. Penentuan Metode Transfer Pricing atas Transaksi Afiliasi	54
C. Sengketa Transfer Pricing Dalam Perbedaan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle)	69
D. Penyimpangan Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara	81
E. Analisis Teori Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan Transfer Pricing.....	84
BAB IV	91
PERAN DAN KEBIJAKAN OTORITAS PERPAJAKAN (DJP) TERKAIT SENGKETA TRANSFER PRICING SERTA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN PAJAK DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN.....	91
A. Tinjauan Teori Kepastian Hukum dan Keadilan Dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi Transfer Pricing.....	91
B. Langkah-Langkah yang dilakukan pemerintah dalam Upaya Penyalahgunaan terjadinya Transfer Pricing Berdasarkan Perspektif hukum perpajakan Indonesia.....	988
C. Analisis Penyelesaian Putusan Sengketa Banding Atas Transaksi Transfer Pricing	1033
D. Analisis Penyelesaian Sengketa Banding Atas Transaksi Transfer Pricing Pajak Pada Pengadilan Pajak.....	106
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Contoh Kasus Sengketa Pajak <i>Transfer Pricing</i> Dengan Amar Putusan Mengabulkan Permohonan	69
Tabel 1.2 Ilustrasi Penerapan Transactional <i>Net Margin Method</i> (TNMM)	82
Tabel 1.3 Waktu Penyelesaian Sengketa Pajak.....	104
Tabel 1.4 Data Sengketa <i>Transfer Pricing</i> Pada Pengadilan Pajak Berdasarkan Amar Putusan	106
Tabel 1.5 Data Sengketa <i>Transfer Pricing</i> Pada Pengadilan Pajak Berdasarkan PKKU	107



ABSTRAK

- A. Nama : Mokhamad Khifni
B. NIM : 2240057028
C. Bagian : Praktisi Hukum
D. Judul : Analisis Kepastian Hukum Dan Keadilan Atas Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Terkait Sengketa Transaksi Transfer Pricing.
E. Halaman :
F. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Keadilan, Transfer Pricing, Sengketa Pajak, Prinsip PKKU, Pengadilan Pajak.

- G. Ringkasan Isi :

Pajak merupakan instrumen utama dalam pembiayaan negara, dengan kontribusi mencapai lebih dari 80% terhadap total penerimaan negara dalam APBN 2024. Dalam sistem self-assessment, Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri. Namun, sistem ini memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak, salah satunya melalui praktik *transfer pricing* yang dilakukan antar entitas yang memiliki hubungan istimewa. Perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak dan otoritas pajak mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Prinsip PKKU) sering kali menjadi sumber sengketa yang berakhir di Pengadilan Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai transfer pricing memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Pajak dalam menangani sengketa transfer pricing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan teori keadilan dari John Rawls.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2019–2023, terdapat 737 perkara sengketa transfer pricing yang ditangani oleh Pengadilan Pajak, dengan 61% dikabulkan, 30% dikabulkan sebagian, dan 9% ditolak. Tingginya tingkat sengketa ini mencerminkan masih adanya ketidakpastian hukum serta inkonsistensi dalam penerapan prinsip PKKU oleh DJP. Perbedaan metode dan data pembandingan yang digunakan oleh DJP dan Wajib Pajak menjadi akar utama sengketa. Di sisi

lain, dualisme kelembagaan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan turut menjadi tantangan dalam mewujudkan independensi pengambilan putusan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peraturan teknis perpajakan terkait transfer pricing serta optimalisasi penggunaan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan *Mutual Agreement Procedure* (MAP). Selain itu, hakim Pengadilan Pajak perlu menyampaikan dasar pertimbangan hukum secara lebih komprehensif dan transparan agar putusan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi para pihak.

- | | |
|-----------------------|--|
| H. Daftar Acuan | : 36 Buku + 9 Jurnal + 4 peraturan perundang-
: Undangan + 3 Tulisan lain |
| I. Dosen Pembimbing I | : Dr. Hendri Jayadi, S.H.M.H. |
| Dosen Pembimbing II | : Dr. Tomson Situmeang, S.H.,M.H. |



ABSTRACT

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|--|
| A. | Name | : | Mokhammad Khifni |
| B. | NIM | : | 2240057013 |
| C. | Specific Program/Department | : | Legal Practitioners |
| D. | Title | : | Analysis Of Legal Certainty And Justice Of Tax Laws And Regulations Relating To Transfer Pricing Transaction Disputes. |
| E. | Pages | : | |
| F. | Keyword | : | Legal Certainty, Justice, Transfer Pricing, Tax Disputes, PKKU Principles, Tax Court. |
| F. | Summary | : | |

Taxes are a key instrument for state financing, contributing more than 80% of total state revenue in the 2024 State Budget. Under the self-assessment system, taxpayers are empowered to calculate, pay, and report their tax obligations independently. However, this system has loopholes that taxpayers can exploit to evade taxes, one of which is through transfer pricing practices between related entities. Differences in interpretation between taxpayers and tax authorities regarding the application of the arm's length principle (PKKU Principle) often lead to disputes that end up in the Tax Court.

This study aims to analyze the extent to which tax laws and regulations regarding transfer pricing provide legal certainty and fairness for taxpayers. Furthermore, this study also aims to evaluate the role of the Directorate General of Taxes (DGT) and the legal considerations of Tax Court judges in handling transfer pricing disputes. The research method used is a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The theories used as a basis are Gustav Radbruch's theory of legal certainty and John Rawls' theory of justice.

The research results show that between 2019 and 2023, 737 transfer pricing disputes were handled by the Tax Court, with 61% granted, 30% partially granted, and 9% rejected. This high dispute rate reflects the persistence of legal uncertainty and inconsistencies in the Directorate General of Taxes' (DGT) application of the PKKU principle. Differences in methods and comparative data used by the DGT and taxpayers are the root cause of disputes. Furthermore, the institutional duality of the Tax Court under the Supreme Court and the Ministry of Finance also poses a challenge to achieving independent decision-making.

This research recommends strengthening technical tax regulations related to transfer pricing and optimizing the use of Advance Pricing Agreements (APAs) and Mutual Agreement Procedures (MAPs). Furthermore, Tax Court judges need to convey the legal basis for their considerations more comprehensively and transparently so that their decisions provide certainty and fairness to the parties.

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| G. | <i>Reference List</i> | : 36 Books + 9 journal + 4 legislations
+ 3 others writings |
| H. | <i>Thesis Supervisor I</i> | : Dr. Hendri Jayadi, S.H.M.H. |
| | <i>Thesis Supervisor II</i> | : Dr. Tomson Situmeang, S.H.,M.H. |